



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang Telah Diterbitkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN.**

Pasal 1

- (1) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan keputusan yang bersifat mengatur sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diterbitkan Kementerian Sosial.
- (2) Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 721



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA****1. UNDANG-UNDANG**

NO	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1947 tentang Undian Uang Negara	
2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	
3	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan	
5	Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan	
6	Undang-Undang Nomor 33 Prps tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan	
7	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo	
8	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	
9	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	
10	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika	
11	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	
12	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
13	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman	
14	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	
15	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	
16	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	
17	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	
18	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
19	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	
20	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	
21	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
22	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
23	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
24	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
25	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
26	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA****2. PERATURAN PEMERINTAH**

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat Ke I	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 347 Tahun 1964 tentang Panji Pembangunan Sosial	
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial Kepada para Wakawuri beserta Yatim Piatu Pahlawan yang Ditinggalkan Gugur	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian	
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan	
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat	
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian	
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin	
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan	
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah	
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah	
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang	



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
	Pendidikan Pra Sekolah	
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa	
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992	
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia)	
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial	
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
30.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	
31.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial	
32.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
33.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA****3. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN**

NO	PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
1	Keputusan Presiden Nomor 227 Tahun 1963 tentang Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional	
2	Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional	
3	Keputusan Presiden Nomor 347 Tahun 1964 tentang Panji Pembangunan Sosial	
4	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 tentang Permainan Lotre Buntut sebagai Kegiatan Subversi	
5	Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam	
6	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Kerja Urusan Repatrian Suku Maluku	
7	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1971 tentang Panitia Repatriasi Suku Maluku	
8	Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian	
9	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggara Undian	
10	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	
11	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat	
12	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	
13	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata	
14	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan	
15	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	
16	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS	
17	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	
18	Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil	
19	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang	



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

NO	PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi	
20	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	
21	Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi	
22	Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan	
23	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan	
24	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan	
25	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
26	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia	
27	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA****4. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI (YANG BERSIFAT MENGATUR)**

NO	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	KETERANGAN
1.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-4-38/3519 tanggal 19 Nopember 1954 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin untuk Mengadakan Undian	
2.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-29/260 tanggal 21 Januari 1955 tentang Pelaksanaan Mengenai Pengusutan Perbuatan-Perbuatan yang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Dapat Dihukum	
3.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Sekr 10-40-26/2423 Tahun 1957 tanggal 26 Januari 1957 tentang Pemberian Sumbangan Uang dari Hasil Tambahan Penjualan Perangko Amal	
4.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Penu.11-23/2558 tanggal 03 Oktober 1957 tentang Tugas Belajar Kepada Pegawai Kementerian Sosial	
5.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Sekr 10-46-13/1886 tanggal 24 September 1958 tentang Pekerjaan, Susunan dan Pimpinan Kementerian Sosial	
6.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Penu.15-33/2143 tanggal 24 September 1958 tentang Kursus Kejurian (Vak) Khusus Kementerian Sosial	
7.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Sekr 10-37-41/1544 tanggal 7 Agustus 1958 tentang Penghentian Perizinan Undian Seharga Lebih Dari Rp 10.000,-	
8.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.10-1-30/743 tanggal 15 Maret 1958 tentang Penyerahan Tugas Dilapangan Urusan Perumahan dari Kementerian Sosial Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tk.I	
9.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.10-3-32/744 tanggal 15 April 1958 tentang Penyerahan Tugas Dilapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial dari Kementerian Sosial kepada Daerah Swatantra Tk.I	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

10.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.6-1-7/261 tanggal 4 Januari 1959 tentang Permainan Untung-Untungan Totalisator Adalah Undian Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954	
11.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.6-1-13/300 tanggal 11 Agustus 1959 tentang Biaya Badan Totalisator	
12.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Penu.11-23/2558 tanggal 3 Oktober 1959 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Departemen Sosial	
13.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.2-1-3/409 tanggal 15 Februari 1960 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha dan Keuangan Sewa Menyewa Rumah	
14.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-12/906 tanggal 25 Mei 1960 tentang Perubahan Struktur Organisasi Departemen Sosial	
15.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.7-1-40/1116 tanggal 18 Mei 1960 tentang Merubah dan Menambah SK Menteri Sosial tanggal 2 November 1959 nomor Huk.7-2-5/1740 tentang Struktur Organisasi Jawatan Pekerjaan Sosial	
16.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.6-1-10/738 tanggal 24 April 1960 tentang Petunjuk-Petunjuk tentang Pemberian Bantuan dari Harta Sosial Hasil Totalisator	
17.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.1-1-16/1456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang	
18.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-9/852 tanggal 6 Mei 1961 tentang Susunan dan Tugas Dewan Pertimbangan	
19.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.6-1-21/875 tanggal 2 Mei 1961 tentang Susunan Seksi-seksi dari Bagian Kesejahteraan Anak Dalam Jawatan Pekerjaan Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

20.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-39/2138 tanggal 8 November 1961 tentang Lapangan Pekerjaan Biro Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Semesta Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial	
21.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-11/6742 tanggal 27 Agustus 1962 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Komando Pertahanan Sipil Departemen Sosial	
22.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-9/3047 tanggal 18 Juni 1963 tentang Tugas dan Wewenang Direktur Lembaga Penyelenggaraan Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri dan Tata Kerja Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Dana	
23.	Peraturan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-33/4819 tanggal 1 Oktober 1964 tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 1964 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 1963 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	
24.	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Huk.4-1-40/5575 tanggal 23 November 1964 tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 1964 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	
25.	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1-1-2/215 tanggal 11 Februari 1965 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 1965 tanggal 11 Februari 1965 tentang Penggunaan Perumahan dalam Masa Peralihan	
26.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-2/1 tanggal 4 Januari 1967 tentang Persyaratan Permohonan untuk Mendapat Izin Undian.	
27.	Keputusan Menteri Sosial RI Nomor Huk.4-2-17/34 tanggal 27 Februari 1967 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Undian oleh Kepala Daerah	
28.	Keputusan Menteri Sosial RI Nomor Huk.3-1-22/79 tanggal 28 Juni 1967 tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 1967 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Rehabilitasi Penderita Cacat	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

29.	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Huk.3-2-28/173 tanggal 14 Nopember 1967 tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 1967 tentang Susunan Organisasi Bidang Tugas Serta Tata Kerja Departemen Sosial	
30.	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Huk.3-2-29/174 tanggal 14 Nopember 1967 tentang Peraturan Menteri Sosial No.16 Tahun 1967 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Aparatur Departemen Sosial di Daerah	
31.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-2/34 tanggal 17 Februari 1970 tentang Pembentukan Polisi Khusus Dana Sosial Departemen Sosial	
32.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-50/107 Tahun 1971 tanggal 6 Juli 1971 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo	
33.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-11/274 Tahun 1972 tanggal 5 Desember 1972 tentang Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Warakuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan	
34.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-36/193 Tahun 1973 tanggal 1 Desember 1973 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Pegawai/Pekerja di Lingkungan Departemen Sosial	
35.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.4-1-1/28 Tahun 1974 tanggal 21 Februari 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Undian	
36.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk. 3-3-8/239 Tahun 1974 tanggal 2 Nopember 1974 tentang Peraturan Panti Sosial	
37.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-3-10/243 Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta	
38.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

39.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-48/132 Tahun 1976 tanggal 17 April 1976 tentang Perubahan Nama Polisi Khusus Dana Sosial Menjadi Satuan Pengamanan Sosial	
40.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 1977 tanggal 2 Nopember 1977 tentang Rumah Pengganti	
41.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-27/78 tanggal 25 Mei 1978 tentang Strategi Pokok dan Program Induk Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial serta Pola Dasar Operasional Departemen Sosial, Periode Repelita III	
42.	Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-53/78 Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakuri Serta Yatim Piatu	
43.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia	
44.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial	
45.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 19 Nopember 1979 tentang Latihan Keahlian Pekerjaan Sosial	
46.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 19 Nopember 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Perlengkapan di Lingkungan Departemen Sosial	
47.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/KEP/I/1980 Tanggal 9 Januari 1980 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Sosial di Propinsi Timor Timur	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

48.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/KEP/IV/1980 Tanggal 29 April 1980 tentang Perubahan Penyempurnaan Beberapa Pasal Bab Kedua Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	
49.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tanggal 1 Oktober 1980 tentang Organisasi Sosial	
50.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/I/1981 tanggal 23 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna	
51.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tanggal 23 Februari 1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat	
52.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/KEP/VIII/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Panti Rehabilitasi Sosial Penderita Cacat	
53.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 1981 tentang Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Yang Diselenggarakan Oleh Badan Sosial	
54.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar	
55.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/III/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh "Prof.Dr.Soeharso" di Surakarta	
56.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

57.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan	
58.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Rehabilitasi Bekas Penderita Kusta	
59.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 52/HUK/KEP/IX/1982 tentang Badan Musyawarah Nasional Kesejahteraan Sosial	
60.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 64/HUK/KEP/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Di Lingkungan Departemen Sosial	
61.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/III/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental Di Temanggung	
62.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Sosial	
63.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 191/HUK/KEP/XI/1983 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	
64.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984 tentang Petugas Sosial Kecamatan (PSK)	
65.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/KEP/II/1984 tentang Sumbangan Sosial Melalui STNK	
66.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/HUK/KEP/II/1984 tentang Pengelompokan Unit Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan dan Persyaratan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

67.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/KEP/II/1984 tentang Ketentuan Pemberian kenaikan Pangkat Pilihan Di Lingkungan Departemen Sosial	
68.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/KEP/II/1984 tentang Persyaratan Pangkat Untuk Jabatan Struktural dan Nota Persetujuan Mutasi Pejabat Eselon III, IV dan V Di Lingkungan Departemen Sosial	
69.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/KEP/II/1984 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	
70.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial	
71.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak	
72.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Dari Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial	
73.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 65/HUK/KEP/XI/1984 tentang Pedoman Pemberian Izin Undian	
74.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/KEP/XI/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib Belajar Melalui Orang Tua Asuh	
75.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 34/HUK/KM/VI/1984 tentang Standarisasi Perabot Perkantoran di Lingkungan Departemen Sosial	
76.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1985 tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di Lingkungan Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

77.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/1986 tentang Penghapusan Organisasi dan Tata Kerja Wisma Departemen Sosial di Ciumbuleuit Bandung dan Puncak Ciloto	
78.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1986 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta Yatim Piatu	
79.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1986 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika dan Anak Nakal dengan Menggunakan Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Lembang (Bandung), Gemah (Semarang) dan Mataram (Lombok)	
80.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 74/HUK/1986 tentang Pedoman Penyusunan Surat dan Bentuk Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Sosial	
81.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/1986 tentang Program Diploma Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	
82.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/1986 tentang Penggunaan Rumah Jabatan Di Lingkungan Departemen Sosial	
83.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Pembimbing Sosial Masyarakat	
84.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/1987 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi, Jabatan dan Kode Disposisi Di Lingkungan Departemen Sosial	
85.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial Dalam Bahasa Inggris	
86.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1988 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

87.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1988 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin Di Lingkungan Departemen Sosial	
88.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1988 tentang Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Departemen Sosial	
89.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	
90.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1989 tentang Ralat Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	
91.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 6/HUK/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial	
92.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1989 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial	
93.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1989 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pekerja Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	
94.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/ 1989 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Masyarakat Yang Berjasa di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial	
95.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Departemen Sosial	
96.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/1990 tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial	
97.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1990 tentang Satuan Pengamanan di Lingkungan Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

98.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan Departemen Sosial	
99.	Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Lingkungan Departemen Sosial	
100	Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial	
101	Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Ahli Pekerja Sosial di Bandung	
102	Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Departemen Sosial	
103	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1992 tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional	
104	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak	
105	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1992 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika	
106	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1994 tentang Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial Republik Indonesia Di Wilayah Kecamatan	
107	Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/1994 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memeperoleh Hak Milik Atas Tanah	
108	Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

109	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial	
110	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Sosial RI	
111	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1995 tentang Pedoman Penyusunan Surat dan Bentuk Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Sosial	
112	Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak	
113	Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana	
114	Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/HUK/1995 tentang Izin Undian	
115	Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1995 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dalam Panti di Lingkungan Departemen Sosial	
116	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di Taman Makam Pahlawan	
117	Keputusan Menteri Sosial Nomor 11/HUK/1996 tentang Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di Lingkungan Departemen Sosial	
118	Keputusan Menteri Sosial Nomor 12/HUK/1996 tentang Prosedur Permohonan Penetapan Sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
119	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

120	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pekerja Sosial	
121	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	
122	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1996 tentang Pekerja Sosial Kecamatan (PSK)	
123	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1996 tentang Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Sosial Pada Pendidikan Ahli Pekerja Sosial (PAPS)/Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	
124	Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/1996 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesejahteraan Sosial Yang Diserahkan Kepada Daerah Tingkat II Percontohan	
125	Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat	
126	Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1996 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial	
127	Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/1997 tentang Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional	
128	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1997 tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	
129	Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar Panti Sosial	
130	Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1997 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

131	Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial	
132	Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1997 tentang Pembinaan Karang Taruna	
133	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia	
134	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1997 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Direktorat Bina Bantuan Sosial Departemen Sosial	
135	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/1997 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak	
136	Keputusan Menteri Sosial Nomor 67/HUK/1997 tentang Penambahan Lokasi Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	
137	Keputusan Menteri Sosial Nomor 68/HUK/1997 tentang Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 68/HUK/1997 tentang Penyelenggaraan Uji Coba Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	
138	Keputusan Menteri Sosial Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial	
139	Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Departemen Sosial	
140	Keputusan Menteri Sosial Nomor 72/HUK/1997 tentang Uraian Tugas Pejabat Sruktural di Lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Departemen Sosial	
141	Keputusan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah Yang Dikaitkan Dengan Penjualan Barang/Jasa (Sales Promotion)	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

142	Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar	
143	Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1998 tentang Perubahan Besarnya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Wakawuri Atau Yatim Piatu Pahlawan	
144	Keputusan Menteri Sosial Nomor 6A/HUK/1998 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar	
145	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia	
146	Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Departemen Sosial	
147	Keputusan Menteri Sosial Nomor 16/HUK/1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Departemen Sosial	
148	Keputusan Menteri Sosial Nomor 17/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial	
149	Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
150	Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Departemen Sosial	
151	Keputusan Menteri Sosial Nomor 26/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof.Dr.Soeharso Surakarta	
152	Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/1998 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

153	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1998 tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada Pahlawan dan Keluarga Pahlawan	
154	Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Departemen Sosial	
155	Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (PRSBG) Kartini Temanggung	
156	Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	
157	Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	
158	Keputusan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/1998 tentang Pancabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter	
159	Keputusan Menteri Sosial Nomor 43/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Depsos	
160	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Indonesia	
161	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/1998 tentang Pemakaman Jenazah Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi	
162	Keputusan Menteri Sosial Nomor 60/HUK/1998 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

163	Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/1998 tentang Pola Penyuluhan Sosial dan Strategi Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial	
164	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa	
165	Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Sosial	
166	Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Departemen Sosial	
167	Keputusan Menteri Sosial Nomor 85/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)	
168	Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Panti Asuhan Anak (PSAA)	
169	Keputusan Menteri Sosial Nomor 96/HUK/1998 tentang Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kesejahteraan Sosial	
170	Keputusan Menteri Sosial Nomor 97/HUK/1998 tentang Pengadaan dan Pendistribusian Bantuan Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman Sosial	
171	Keputusan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/1998 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	
172	Keputusan Menteri Sosial Nomor 04/HUK/1999 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Depsos	
173	Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1999 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Kekacauan	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

174	Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1999 tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus Dan Atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Sosial	
175	Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila	
176	Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) Departemen Sosial	
177	Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/1999 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Binrehsos Depsos	
178	Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial	
179	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1999 tentang Izin Undian	
180	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/1999 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja Di Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesos	
181	Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/1999 tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial	
182	Keputusan Menteri Sosial Nomor 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis	
183	Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) Cibinong	
184	Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/1999 tentang Uraian Tugas Pejabat Fungsional Pekerja Sosial di Lingkungan Panti Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

185	Keputusan Menteri Sosial Nomor 93 A/HUK/1999 tentang Standarisasi Ruangan Kantor ,Alat Perlengkapan Kantor ,Rumah Negara dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Depsos	
186	Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas Yang Di Butuhkan Penyandang Cacat	
187	Keputusan Menteri Sosial Nomor 116/HUK/1999 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Depsos	
188	Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 01/HUK/BKSN/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Sosial Nasional	
189	Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor 02/HUK/BKSN/2000 tentang Kop Dan Penomoran Naskah Dinas Serta Cap Jabatan Di Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional	
190	Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/PEGHUK/2002 tentang Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	
191	Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	
192	Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian	
193	Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/PEGHUK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial	
194	Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/PEGHUK/2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	
195	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/PEGHUK/2002 tentang Penanggulangan Bencana	
196	Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Penyusunan Surat dan Bentuk Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

197	Keputusan Menteri Sosial Nomor 69 A/HUK/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbandaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Depsos	
198	Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Sosial	
199	Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktual di Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial	
200	Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Sosial	
201	Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Lingkungan Departemen Sosial	
202	Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Kerja di Lingkungan Departemen Sosial	
203	Keputusan Menteri Sosial Nomor 39/HUK/2003 tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	
204	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional	
205	Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2003 tentang Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu Melalui Pola Asuransi Kesejahteraan Sosial Permanen	
206	Keputusan Menteri Sosial Nomor 53/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	
207	Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

208	Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "PROF.DR.SOEHARSO" Surakarta	
209	Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "Kartini" di Temanggung	
210	Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	
211	Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso"	
212	Keputusan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial	
213	Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2003 tentang Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Rentan	
214	Keputusan Menteri Sosial Nomor 66/HUK/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Departemen Sosial	
215	Keputusan Menteri Sosial Nomor 69/HUK/2003 tentang Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal	
216	Keputusan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2001-2004	
217	Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2003 tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial	
218	Keputusan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

219	Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah	
220	Keputusan Menteri Sosial Nomor 35/HUK/2004 tentang Pungutan Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial	
221	Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP)	
222	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian	
223	Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor Dan Dunia Usaha	
224	Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial RI	
225	Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	
226	Keputusan Menteri Sosial Nomor 113/HUK/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial	
227	Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian	
228	Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana	
229	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 / HUK / 2007 tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial	
230	Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 / HUK / 2007 tentang Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial	
231	Peraturan Menteri Sosial Nomor 36 / HUK / 2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

232	Peraturan Menteri Sosial Nomor 51/ HUK / 2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	
233	Peraturan Menteri Sosial Nomor 58 / HUK / 2007 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial	
234	Peraturan Menteri Sosial Nomor 102 / HUK / 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center	
235	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain	
236	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial	
237	Peraturan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Departemen Sosial	
238	Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	
239	Peraturan Menteri Sosial Nomor 141/HUK/2008 tentang Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009	
240	Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 / HUK / 2009 tentang Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang di Lingkungan Departemen Sosial Tahun 2009	
241	Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 / HUK / 2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial	
242	Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 / HUK / 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Bidang Kesejahteraan Sosial	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

243	Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 / HUK / 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	
244	Peraturan Menteri Sosial Nomor 61 / HUK / 2009 tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial	
245	Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2009 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2010	
246	Peraturan Menteri Sosial Nomor 106 / HUK / 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial	
247	Peraturan Menteri Sosial Nomor 107 / HUK / 2009 tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	
248	Peraturan Menteri Sosial Nomor 108 / HUK / 2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	
249	Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak	
250	Peraturan Menteri Sosial Nomor 111 / HUK / 2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial	
251	Peraturan Menteri Sosial Nomor 41 / HUK / 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
252	Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 / HUK / 2010 tentang Penetapan Peraturan Dasar Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia	
253	Peraturan Menteri Sosial Nomor 57 / HUK / 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera	
254	Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna	

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

255	Peraturan Menteri Sosial Nomor 79 / HUK /2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara	
256	Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2010 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	
257	Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 / HUK /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Republik Indonesia	
258	Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
259	Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	
260	Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/ HUK / 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia	
261	Peraturan Menteri Sosial Nomor 60 /HUK /2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
262	Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 /HUK /2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I Di Lingkungan Kemensos	
263	Peraturan Menteri Sosial Nomor 91/ HUK /2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	
264	Peraturan Menteri Sosial Nomor 100/HUK/2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	
265	Peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

266	Peraturan Menteri Sosial Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana	
267	Peraturan Menteri Sosial Nomor 176/HUK/2011 tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang	
268	Peraturan Menteri Sosial Nomor 182/HUK/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kemensos Republik Indonesia	
269	Peraturan Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	
270	Peraturan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 - 2014	
271	Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat	
272	Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera	
273	Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	
274	Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	
275	Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia	

Jakarta, 12 Juli 2012

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI